

**IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
TENAGA KERJA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI STUDI KASUS DI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

**RAFIKA AHLUSSUNNAH
NPM. 210411006**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN DI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI STUDI KASUS KECAMATAN KUANTAN
TENGAH
NAMA : RAFIKA AHLUSSUNNAH
NPM : 210411006
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 15
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|
| 1. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si | (Pembimbing I) | () |
| 2. DESRIADI, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji I) | () |
| 3. SARJAN M, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji II) | () |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Rafika Ahlussunnah
NPM : 210411006
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahan skripsi yang berjudul Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Di Kecamatan Kuantan Tengah Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Rafika Ahlussunnah
NPM. 210411006

MOTTO

“ Tidak ada sseeorang yang belajar dengan giat dan bekerja dengan keras kecuali wanita yang menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang akan mewujudkan semua mimpinya kecuali dirinya seniri.”-chofifaah

“Balas dendam paling baik adalah mengubah dirimu menjadi lebih baik.”-Ali bin abi thalib

“Dari orang tua, untuk orang tua, demi orang tua, dan harapan orang tua, karna saya hidup untuk orang tua”

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

KATA PERSEMBAHAN

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan penulis manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk seluruh kasih sayang yang selalu menjadikan kekuatan dan semangat terbesarku :

1. Kepada Ayahandaku ABU KASIM dan Ibundaku tercinta ERNIFA.
Terima kasih yang tiada henti memberi penulis semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga penulis selalu kuat memberi penulis semangat sampai saat ini. Terimakasih telah banyak mengorbankan materi, waktu, tenaga dan mengorbankan hidup untuk pendidikan terbaik penulis.
2. Kepada Adik-adik saya Apebrah Shohih, Kamil Ma'ruf, Maftuh Iskandar, Firman Kadafi, dan Jinnary Shaf terimakasih telah menjadi penyemangat penulis untuk mencapai gelar sarjana. Kalian adalah alasan penulis harus sukses, agar hidup kalian harus lebih baik dari penulis nanti nya.
3. Kepada teman terbaik saya Neni Ramadhan Aulia, terimakasih telah menjadi teman yang selalu ada di kondisi apapun, terimakasih telah berjuang bersama untuk mencapai gelar sarjana. Terimakasih telah menemani penulis bahkan di masa sulit sekalipun, terimakasih telah menjadi bagian terpenting di hidup penulis, tanpa kamu mungkin kuliah ini sangat berat. *Redscoopy* menjadi saksi perjuangan kita untuk mendapatkan pajero sport dan fortuner cumi itu nantinya.
4. Kepada diri saya sendiri RAFIKA AHLUSSUNNAH. Terimakasih dan maaf. Terimakasih sudah berjuang sejauh ini, ini sangat sulit tapi

kamu bisa. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri sendiri. Maaf untuk semua paksaan memaklumi hal-hal yang sebenarnya menyakiti, Adapun kurang dan lebih mu mari merayakan diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.

5. Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.
6. Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI STUDI KASUS DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

RAFIKA AHLUSSUNNAH
NPM.210411006

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Kuantan Singing Studi Kasus di Kecamatan Kuantan Tengah. Untuk itu dibuatlah peraturan bupati 10 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja. Peraturan ini merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan di daerah Kabupaten Kuantan Singing. Fokus utama penelitian adalah untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan ini dapat memperbaiki struktur organisasi, kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mengelola isu ketenagakerjaan serta mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Kuantan Singing. Metode penelitian yang digunakan adalah *mix method* yaitu metode penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Kuantan Singing, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah cukup terimplementasikan. Keberhasilan terlihat dari pelatihan kerja yang meningkatkan keterampilan peserta pencari kerja, memungkinkan mereka bersaing di pasar kerja dan membuka usaha mandiri.

Kata Kunci: Implementasi tugas pokok dan fungsi.

ABSTRACT

Implementation Of The Main Tasks And Functions Of The Employment Service In Overcoming Unemployment In Kuantan District, A Case Study In The Central Kuantan Sub-District

By :

RAFIKA AHLUSSUNNAH

NPM.210411006

This research aims to analyze the Implementation of the Main Tasks and Functions of the Manpower Office in Overcoming Unemployment in Kuantan Regency Singing Case Study in Central Kuantan District. For that, the regent's regulation of 10th year 2022 was made regarding the position, organizational structure, duties and functions as well as the working procedures of the Manpower Service. This regulation is an effort to increase the efficiency and effectiveness of the implementation of tasks in the field of employment in the Kuantan Singingi Regency. The main focus of the research is to assess the extent to which the implementation of this regulation can improve the organizational structure, performance, and service to the community, especially in managing employment issues and reducing unemployment and opening jobs in Kuantan Singingi Regency. The research method used is a mix method, which is a combined research method between qualitative and quantitative. Based on the results of research on the implementation of the main tasks and functions of the Manpower Office in overcoming unemployment in Kuantan Singingi Regency, especially in Central Kuantan District, it can be concluded that the program has been sufficiently implemented. Success can be seen from job training that improves the skills of job seekers, allowing them to compete in the job market and open independent businesses.

Keywords: Implementation of main tasks and functios

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakathu

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“implementasi tugas pokok dan fungsi dinas tenaga kerja dalam mengatasi pengangguran di kabupaten kuantan singingi studi kasus di kecamatan kuantan tengah”**. Penyusunan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Kuantan Singingi.

Ber iringan Do'a dari berbagai pihak penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar besarnya terutama kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Abu kasim dan Ibunda tersayang Ernifa yang telah berjuang bersusah payah membesarkan dan membimbing dari kecil dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam Penelitian ini penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk kesempurnaan usulan penelitian ini, namun keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kesalahan dalam penyusunan penelitian ini, oleh karna itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Ibu DR. Ikrima Mailani, S. Pdi., M. Pdi selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si selaku ketua program studi Administrasi Negara dan selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Sarjan, S.Sos., M.Si selaku penasehat akademik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

7. Seluruh staff karyawan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Kepada Adik-adik saya Apebrah Shohih, Kamil Ma'ruf, Maftuh Iskandar, Firman Kadafi, dan Jinnary Shaf terimakasih telah menjadi penyemangat penulis untuk mencapai gelar sarjana.
9. Kepada teman terbaik saya Neni Ramadhan Aulia, terimakasih telah menjadi teman yang selalu ada di kondisi apapun, terimakasih telah berjuang bersama untuk mencapai gelar sarjana.
10. Kepada teman teman seperjuangan Administrasi Negara Kelas B angkatan 2021, terimakasih telah menemani proses penulis untuk menggapai gelar Sarjana.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan proposal ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan berguna agar pada penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakathu

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Secara Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	12
2.1.2 Teori/ Konsep Organisasi	17
2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan Publik	20
2.1.4 Teori/Konsep Implementasi	23
2.1.5 Konsep tugas pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja	26
2.2 Kerangka Pemikiran	29
2.3 Hipotesis	30
2.4 Definisi Operasional	30
2.5 Operasional Variabel	32

BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian	33
3.2. Informan, Populasi dan Sampel.....	34
3.3. Sumber Data	36
3.3.1 Data Primer	36
3.3.2 Data Sekunder	37
3.4 Fokus Penelitian	37
3.5 Lokasi Penelitian	37
3.6 Metode Pengumpulan Data	37
3.6.1 Kuesioner	37
3.6.2 Wawancara	38
3.6.3 Observasi	38
3.6.4 Dokumentasi	38
3.6.5 Triangulasi	39
3.7 Analisis Data	39
3.7.1 Penskoran	39
3.7.2 Reduksi Data	42
3.7.3 Penyajian Data (Display Data)	42
3.7.4 Penarikan Kesimpulan	42
3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Sejarah Ringkas Kabupaten Kuantan Singingi	44
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	44
4.1.2 Kondisi Geografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	45
4.1.3 Demografi Kabupaten Kuantan Singingi.....	46
4.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi	46
4.2.1 Sejarah berdirinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.....	46
4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja	47
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Identitas Responden.....	54

5.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin	54
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur	55
5.1.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
5.2 Hasil Penelitian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah	56
5.2.1 Pelatihan Kerja	58
5.2.2 Penempatan Kerja	67
5.2.3 Perluasan Kesempatan Kerja.....	77
5.3 Analisa Peneitian Mengenai Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah	92
BAB VI PENUTUP.....	95
6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Tabel Data Pelaksanaan Pelatihan Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2023-2024.....	9
Tabel I. 2 : Pejabat Struktural Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.....	9
Tabel III.1 : Jumlah informen dan key informen dalam penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.....	35
Tabel 3. 1 : Penskoran Skala Likert untuk Kuesioner	40
Tabel 3. 2 : Kategori Penskoran Skala Persentase.....	41
Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah	43
Tabel 5.1 : Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 5.4 : Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan efektifitas pelatihan kerja dalam meningkatkan keterampilan.....	58
Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Pencapaian Tujuan Pelatihan Kerja	61
Tabel 5.6 : Rekapitulasi Tanggapan Indikator Pelatihan Kerja	64
Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Kesesuaian Posisi Dengan Keterampilan Kerja	68
Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Fasilitas Pelatihan .	71
Tabel 5.9 : Rekapitulasi Tanggapan Indikator Penempatan Kerja	74
Tabel 5.8 : Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Informasi	77
Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Pengembangan Karir.....	80

Tabel5.10 : Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Kerja Sama	83
Tabel5.11 : Rekapitulasi Tanggapan Indikator Perluasan Kesempatan Kerja .	85
Tabel5.12 : Rekapitulasi Hasil Tanggapan Informan Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuntan Tengah.....	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Diagram Tabel Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2023.....	..5
Gambar 2.1 : Tabel Jumlah Masyarakat Pengangguran berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.....	..6
Gambar II.1 : Kerangka pemikiran Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.....	..29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai organisasi merupakan konsep penting dalam ilmu politik dan hukum yang menggambarkan bagaimana negara berfungsi sebagai entitas yang mengatur masyarakat.

Secara keseluruhan, negara sebagai organisasi adalah entitas yang kompleks dengan tanggung jawab besar terhadap masyarakatnya. Negara berfungsi tidak hanya sebagai pengatur tetapi juga sebagai pelindung dan penyedia kesejahteraan bagi rakyat. Pemahaman tentang negara sebagai organisasi sangat penting dalam konteks pemerintahan, hukum, dan hubungan sosial dalam masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun Indonesia saat ini belum bisa dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang mencengkram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi.

Dan hal yang paling menakutkan dari dampak masalah sosial ekonomi adalah pengangguran. masalah pengangguran ini merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan bangsa Indonesia. Hal ini mengingat jumlah kepadatan

penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya membawa akibat bertambah pula jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat seiring dengan itu pengangguran relative akan bertambah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara, terutama digunakan untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi pada periode tertentu. Terjadi pertumbuhan ekonomi jika produksi barang dan jasa meningkat dari periode sebelumnya.

Tercapainya pemerataan ekonomi kepada masyarakat sehingga terjadi kesejahteraan dan makmur merupakan cita-cita semua bangsa dan negara, akan tetapi untuk mewujudkan kondisi yang ideal tersebut membutuhkan perjuangan yang panjang dan masih sedikit negara yang mampu mewujudkannya. Fakta masalah pengangguran merupakan problem makroekonomi yang dihadapi di seluruh negara. Oleh karena itu, masalah pengangguran menjadi fokus utama di beberapa negara untuk mencapai kesejahteraan. Jika penanggulangan masalah pengangguran tidak optimal, maka akan berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pengangguran

merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif.

Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena, adanya pengangguran maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang. Sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial.

Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, menghilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun.

Dengan terus bertambahnya jumlah populasi penduduk dari tahun ke tahun disatu sisi memang memberikan dampak positif yaitu tersedianya lapangan pekerjaan. Namun disisi lain karena banyaknya jumlah tenaga kerja tidak sebesar jumlah kesempatan kerja yang tersedia maka banyak penduduk yang menjadi pengangguran. laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan terjadinya kelebihan tenaga kerja dan apabila tanpa diikuti dengan perluasan kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah pengangguran.

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*rantau nan tigo jurai*). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kuansing menggunakan adat istiadat

serta bahasa Minangkabau. Kabupaten ini berada dibagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

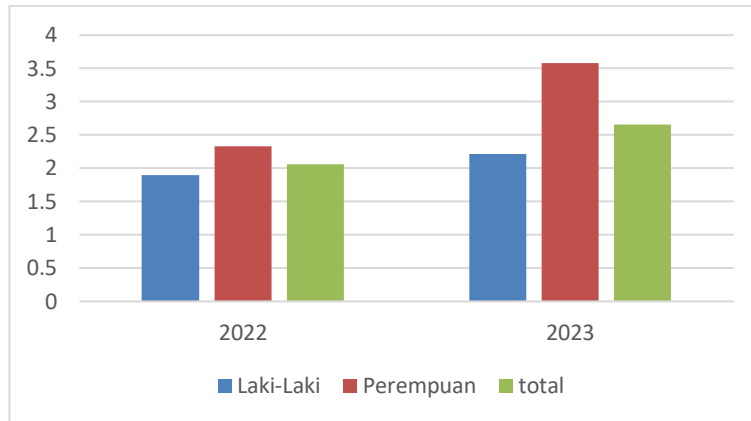
Kabupaten Kuantan Singingi berada pada wilayah perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km²).

Menurut Data Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tingkat pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Data terbaru mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,49%, meningkat sebesar 1,7% dari tahun 2022.

Secara spesifik, jumlah pengangguran di Kuantan Singingi pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4.108 jiwa, yang menunjukkan tren kenaikan dibandingkan dengan 3.998 jiwa pada tahun 2022. Dari total jumlah pengangguran tersebut, terdapat 2.237 laki-laki dan 1.761 perempuan yang termasuk dalam kategori pengangguran. Peningkatan ini terjadi meskipun ada perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 73,35%, dan tingkat kemiskinan yang menurun menjadi 8,07%.

Berikut Gambar Diagram Tabel Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2023

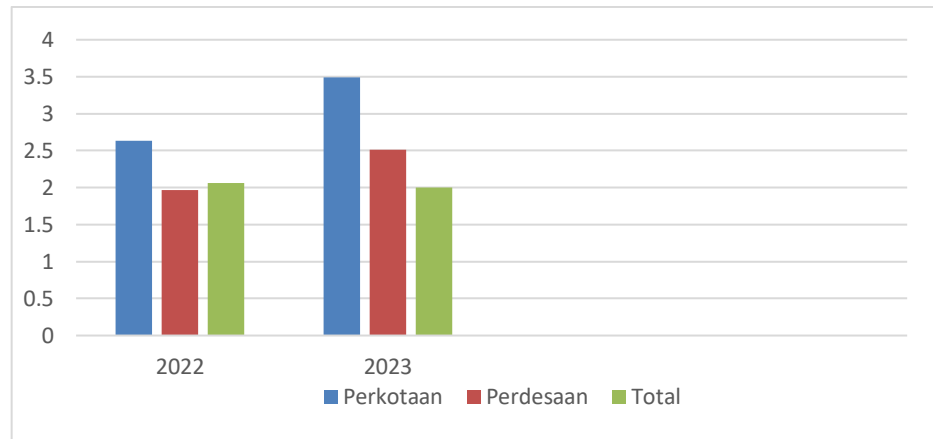
Gambar 1.1 :Diagram Tabel Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022-2023



Sumber : BPS Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan Gambar 1.1, pada tahun 2022, Pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi secara umum mencapai 2,06 persen. Artinya, sekitar 2 dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja sedang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Angka ini sedikit meningkat menjadi 2,66 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 diduga terjadi penurunan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk berpartisipasi dalam dunia kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 2.1 :Tabel Jumlah Masyarakat Pengangguran berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan



Sumber : Data Statistik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Sementara jika dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1, tampak bahwa tingkat pengangguran perkotaan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran perdesaan, baik pada tahun 2022 maupun pada tahun 2023. Artinya penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan lebih baik dibandingkan di wilayah perkotaan. Ini dapat diakibatkan karena kepadatan penduduk di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan dan hal tersebut tidak diikuti dengan tingginya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga pengangguran di wilayah perkotaan menjadi lebih tinggi dibandingkan pengangguran di wilayah perdesaan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja kabupaten Kuantan Singingi Pasal 8 Ayat 1 dan 2 menyebutkan :

Ayat 1 : Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Ayat 2 : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bidang pelatihan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pelatihan kerja merupakan salah satu strategi yang sangat penting dalam upaya mengatasi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, pengembangan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas utama bagi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), mengingat tantangan pasar kerja yang semakin kompetitif serta kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi masyarakat, khususnya angkatan kerja muda dan para pencari kerja, untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui program pelatihan kerja yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Dengan pelatihan kerja yang tepat, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kapasitas diri mereka, baik dalam aspek teknis

maupun non-teknis, yang pada gilirannya membuka peluang kerja dan meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kuantan Singingi berfokus pada beberapa bidang keterampilan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, hingga keterampilan berbasis teknologi. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja atau usaha, sehingga mempersiapkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan dinamika pasar.

Namun, meskipun program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Disnaker sudah banyak memberikan dampak positif, tantangan yang dihadapi tetap besar. Keterbatasan akses terhadap pelatihan yang berkualitas, kurangnya informasi mengenai peluang pelatihan, serta kebutuhan akan penguatan kerjasama dengan dunia industri dan sektor swasta masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, peran Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun dan melaksanakan program pelatihan kerja yang efektif dan tepat sasaran menjadi sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan siap bersaing di pasar kerja.

Dalam konteks ini, pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kuantan Singingi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi baru dan permintaan akan keterampilan

khusus, program pelatihan kerja ini harus selalu beradaptasi agar relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha yang terus berkembang.

Tabel I.1 : Tabel Data Pelaksanaan Pelatihan Oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2023-2024

NO	Nama Pelatihan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1	Tata Boga	-	16	16
2	Kewirausahaan	10	6	16
3	Pembuatan Batako	25	-	25
4	Pembuatan Kompos	25	-	25
5	Kewirausahaan	8	8	16
6	Tataboga		16	16
JUMLAH				130

Sumber : Data Statistik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel I. 2 : Pejabat Struktural Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Nama	Jabatan
Drs. Masnur, MM	Plt Kepala Dinas
Eni Puspita Sari, SE	Plt Kasubag Umum
Riaristha Gusmiharti, Amd	Plt Kasubag Program Dan Keuangan
Asrizal, SE, M.Si	Plt Kabid Pelatihan, Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Aprimon, S. Kom	Kabid Syarat Kerja Hubungan Industrial Dan Jamina Sosial Tenaga Kerja

Sumber : Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, setiap organisasi perangkat daerah harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerjanya. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022 sebagai landasan hukum untuk mengatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan struktur organisasi dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan perangkat daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.

Implementasi Peraturan Bupati ini menjadi landasan penting dalam menjawab berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan, seperti pengangguran, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis. Dengan demikian, Dinas Tenaga Kerja dapat menjalankan perannya secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Peraturan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, memberdayakan tenaga kerja lokal, dan mendukung terciptanya lapangan kerja baru.

Dengan masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Di Kecamatan Kuantan Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah : “Bagaimana Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kuantan Tengah?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil pemikiran dan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara, memperkaya inventaris hasil penelitian di bidang administrasi , tata kelola yang baik, dan kinerja yang maksimal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai dasar acuan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Teori administrasi negara merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada negara. Para ahli yang selama ini banyak mengutarakan pendapatnya mengenai teori administrasi negara juga memiliki perbedaan satu sama lain meskipun sebenarnya masih dalam konteks yang sama.

Menurut Rahmawati (2018:3) administrasi negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi Negara merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Menurut John M. Pfiffer dan Robert V (dalam Rahmawati, 2018:3) administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pengarahannya kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Hildawati (2024:13) pada prinsipnya administrasi negara diartikan sebagai suatu sistem dan proses kerja sama yang rasional dan manusiawi

yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan negara dan warga negara dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam bernegara, sesuai dengan kedudukan, peran, kepentingan, dan tanggung jawab masing-masing dalam pemerintahan. kehidupan bangsa, serta disiplin ilmu yang mempelajari fenomena sistemik.

Menurut Humairah Almahdali (2024:1) administrasi publik ialah ilmu sosial yang mengkaji sistem ketatanegaraan suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan publik yang mencakup organisasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan pelayanan. Pada dasarnya ilmu administrasi publik berkaitan dengan upaya memahami bagaimana suatu kelompok masyarakat, suku atau bangsa menyatukan diri untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Aneta (2012:3) ilmu administrasi negara pada dasarnya adalah mempelajari seluruh kegiatan atau proses mengenai kerjasama di antara manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan yang berupa kerjasama tersebut sifatnya umum dalam arti telah ada sejak jaman dahulu sampai sekarang. Kerjasama itu sendiri sifatnya dapat menjurus kearah pencapaian tujuan pribadi (privat) dan dapat pula menjurus kearah pencapaian tujuan masyarakat (publik).

Tujuan utama administrasi negara adalah untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan publik atau masyarakat. Beberapa tujuan spesifik administrasi negara meliputi :

1. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Administrasi negara bertujuan untuk melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien.

2. Mewujudkan keinginan umum masyarakat seperti keamanan, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan.
3. Mencapai peningkatan kualitas hidup dan perdamaian pada seluruh tatanan negara.
4. Menyelesaikan permasalahan publik melalui perbaikan di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran.
5. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien.
6. Mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat agar berjalan dengan baik dan benar.
7. Menerapkan prinsip-prinsip demokratis dalam pelaksanaan administrasi negara, seperti partisipasi sosial, tanggung jawab sosial, dukungan sosial, dan kontrol *social*.
8. Meningkatkan otonomi dan akuntabilitas program pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan *public*.
9. Mengembangkan pengelolaan program yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.
10. Meningkatkan manajemen pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, responsif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya ilmu adminisirasi berorientasi kepada pencapaian tujuan yang bersifat privat disebut dengan istilah "Administrasi Privat/Niaga". Sedangkan ilmu administrasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan masyarakat disebut dengan istilah "Administrasi

Publik/Negara". Dengan demikian tidak heranlah apabila seluruh konsep, teori atau sistem analisis dari ilmu administrasi digunakan atau berlaku pula dalam administrasi niaga atau administrasi negara.

Menurut Nugraha (2022:17) administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut.

Dalam hal ini, administrasi negara selalu berupaya menata segenap aspek yang terdapat pada aktivitas negara seperti birokrasi, penyiapan, tata kelola, pelaksanaan, serta pengawasandari seluruh tindakan pemerintah, agar sistem ke pemerintahan di sebuah negara berjalan secara konsisten. Kekonsistenan pada sistem administrasi negara sangat perlu dilakukan agar tujuan dari kegiatan pemerintahan dapat terlaksana dengan hasil kualitas dan kuantitas yang maksimal sesuai dengan rencana awal kegiatan pemerintah tersebut.

Menurut Dimock (dalam Nugraha, 2022:15) mengemukakan Administrasi juga termasuk bagian dari proses politik. Hal itu dapat dilihat melalui ilmu yang dipelajari mengenai kekuasaan dari suatu organisasi atau kelembagaan politik dari suatu negara serta proses kegiatan ketatanegaraan yang dapat berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu. pemerintah bidang legislatif, eksekutif, dalam koordinasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan ataupun sebagian.

Menurut Prayudi Atmosudirdjo (dalam Utama, 2014:6) melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak(*strategy,policy*)serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Prayudi Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut.

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional”.
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dari pandangan di atas, sesungguhnya pengertian tentang administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi :

1. Administrasi negara sebagai organisasi,
2. Administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (publik) artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara dwigend recht (hukum yang memaksa).

Hal ini memperjelas bahwa administrasi negara tidak sekadar membahas pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi administrasi juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya

mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara itu. Pengertian administrasi negara pada akhirnya lebih dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan segenap unsur dan sifat-sifat sistem guna mencapai suatu tujuan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, administrasi negara harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Teori organisasi adalah teori yang dipakai dalam mempelajari proses kerja sama antarindividu, hakikat kelompok di dalam organisasi dalam mencapai tujuan hingga berbagai cara yang dipakai dengan menggunakan teori untuk bisa menjelaskan bentuk tingkah laku. Layaknya motivasi, seorang individu dalam melakukan proses kerja sama dalam sebuah organisasi.

Organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang dibentuk lewat munculnya sekelompok individu, dengan interaksi antara satu individu dengan yang lainnya. Kemudian membentuk pola secara terstruktur, caranya membuat setiap anggota yang terdapat di dalamnya memiliki tugas serta fungsi masing-masing hingga menjadi kesatuan dengan tujuan tertentu.

Pada umumnya, organisasi berbentuk sebuah wadah dengan perkumpulan orang yang saling terikat dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi dibentuk dengan sebuah tujuan, sebagai sarana dalam melakukan manajemen hingga dapat dijadikan sebagai alat koordinasi antara sumber bahan yang ada hingga sumber daya dari manusia.

Menurut James D Money (dalam Widyanti, 2019:15) organisasi adalah bentuk setiap kerja sama manusia untuk pencapaian tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo (dalam Widyanti, 2019:15) organisasi adalah struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi.

Menurut GR Terry (dalam Widyanti, 2019:15) organisasi berasal dari kata organism, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut sehingga dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur dari organisasi adalah :

- a. Terdapat dua orang atau lebih
- b. Adanya maksud untuk kerja sama
- c. Adanya pengaturan hubungan
- d. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka definisi organisasi adalah wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari rumusan ini , ada 3 unsur yang menonjol, yaitu :

1. Organisasi bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok.
2. Organisasi adalah wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat hubungan formal.

3. Dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki, artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan atasan dan apa yang dinamakan bawahan.

Tujuan organisasi merupakan aspek fundamental yang mendasari keberadaan dan operasional suatu kelompok. Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh anggotanya. Berikut adalah beberapa tujuan utama organisasi yang sering dijadikan acuan :

Tujuan Umum Organisasi

1. Mencapai Keinginan Bersama: Organisasi bertujuan untuk merealisasikan cita-cita dan keinginan kolektif anggotanya. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara anggota.
2. Mendapatkan Keuntungan: Dalam konteks bisnis, salah satu tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan finansial. Ini juga berlaku untuk organisasi non-profit yang ingin mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.
3. Meningkatkan Kemandirian: Organisasi membantu anggotanya mengatasi keterbatasan individu dengan memberikan dukungan kolektif, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang lebih besar.
4. Pengakuan dan Penghargaan: Organisasi bertujuan memberikan pengakuan kepada anggotanya atas kontribusi yang telah diberikan, yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja.

5. Interaksi dan Pengalaman: Anggota organisasi mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan belajar dari satu sama lain, yang dapat memperkaya pengalaman pribadi dan profesional mereka.
6. Hasil Akhir yang Ditetapkan: Organisasi berusaha mencapai hasil tertentu dalam waktu yang telah ditentukan, memastikan efisiensi dalam pencapaian tujuan.

Menurut Dicky Wisnu (2019:45) organisasi didefinisikan sebagai suatu entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya individu dengan sistematis, terpimpin, dan terencana, serta memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Arie Ambarwati (2021:3) organisasi didefinisikan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, dan terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. organisasi dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, organisasi bukan hanya sekumpulan individu, tetapi juga struktur yang memungkinkan adanya koordinasi dan interaksi antar anggota agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun

lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Nur dan Guntur (2019:9) secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Friedrich (dalam Nur dan Guntur, 2019:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Menurut rahmawati Gulo dan Mendrofa (2024:2) kebijakan atau kajian kebijakandapat pula merujuk pada proses pembuatankeputusan-keputusanpenting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Papilaya, 2020:5) kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Menurutnya, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi negara untuk melindungi kepentingan masyarakat (kelompok) yang kurang beruntung. Dari definisi Chandler dan Plano, kebijakan publik masuk dalam lapis pemaknaan kebijakan publik sebagai intervensi dari pemerintah. Optimalisasi kebijakan public kemudian ada pada ranah sumber daya berupa sistem dalam masyarakatnya, sehingga kebijakan publik akan menghasilkan output yang berfungsi mensinergikan kebijakan tersebut.

Menurut Udin (2017:9) kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara.

Menurut Syahrudin (2018:3) kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah, karena itu fokus utama administrasi publik adalah kebijakan publik. Administrasi publik, dipandang sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan keputusan dalam kebijakan publik.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat

kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

2.1.4 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sebastier (dalam Cristianingsih, 2020:7) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Patton dan Sawicki (dalam Cristianingsih, 2020:7) implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan

program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Menurut Awang (dalam Indah dan Hariyanti, 2018:6) implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap pembuatan keputusan dalam pembentukan sebuah kebijakan.

Menurut Syahrudin (2019:3) implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal dalam kenyataan dapat kita lihat sendiri bahwa betapa pun hebatnya suatu rencana program atau kegiatan tetapi apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya,

dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu Peraturan pemerintah yang berlaku.

Menurut William dan Elmore (dalam Alexander phuk, 2019:26) implementasi adalah "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan", atau "implementasi kebijakan berarti implementasi dari suatu kebijakan atau program". Dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik memuat serangkaian kegiatan atau tindakan yang secara operasional merupakan pedoman dan panduan sekaligus kerangka kerja, melalui cara mana organisasi tersebut dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya baik mekanisme maupun program dalam memecahkan persoalan publik yang dihadapinya.

Menurut Van Meter dan Horn (dalam Alexander Phuk, 2019:26) implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana diformulasikan dalam kebijakan tersebut. Van meter dan Horn memandang sebuah kebijakan bukan saja dirumuskan oleh pemerintah namun pihak lain pun (swasta) sesuai dengan kepentingan organisasi dapat membuat dan mengimplementasikan kebijakan itu kepada masing-masing kelompok sasaran baik individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dari kebijakan organisasinya.

Implementasi juga merupakan aktivitas dari kegiatan administrasi pada suatu institusi yang dijalankan oleh unit administratif atau badan publik mulai dari perencanaan hingga evaluasi untuk mencapai tujuan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan,terdapat empat hal penting yang harus diperhatikan,yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas, bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu perintah-perintah atau keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut harus ada pengkajian yang benar-benar signifikan agar dalam tahap implementasi suatu keputusan atau kebijakan tersebut tidak berdampak negatif dan merugikan masyarakat sebagai sasaran dari implementasi tersebut.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya berbagai intervensi berbagai kepentingan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.1.5 Konsep Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memiliki peran penting dalam pengelolaan ketenagakerjaan di Indonesia. Tugas dan fungsi Disnaker bervariasi tergantung

pada wilayahnya, tetapi secara umum mencakup beberapa aspek kunci yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mengatur hubungan industrial.

Menurut Udin (2023:2) dalam pelaksanaan program kerjanya dinas tenaga kerja mencakup beberapa bidang diantaranya dalam bentuk pelayanan, pelayanan ini bisa dilakukan dengan dinas terkait, selain itu dinas ketenagakerjaan juga memiliki tanggung jawab sebagai pemberi perlindungan bagi para pekerja guna mencapai haknya, dalam hal lain dinas tenaga kerja juga memberikan pelayanan untuk perlengkapan yang ada dalam perusahaan.

Peran dinas tenaga kerja dalam lingkup hukum administrasi negara ini memberikan cakupan dalam hal kebijakan untuk pihak tenaga kerja dan menjamin kesejahteraan hak nasional pekerja atau masyarakat. Sehingga dinas tenaga kerja memang berada di lingkup hukum administrasi negara yang artinya melaksanakan program program yang harus dijalankan dengan menaati aturan perundang-undangan yang terkait sesuai sistem didalamnya. Keterkaitan nya dengan hukum administrasi negara ini diatur dalam undang undang berikut aturan yang terkait :

- a. Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahan yakni Undang undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menurut Jeffri Chandra Irvanto (dalam Udin et al, 2023:2) Dinas Tenaga Kerja bertugas untuk mengurus masalah ketenagakejaan yang ditujukan dalam menyediakan lapangan kerja. Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja adalah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kesempatan kerja.

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

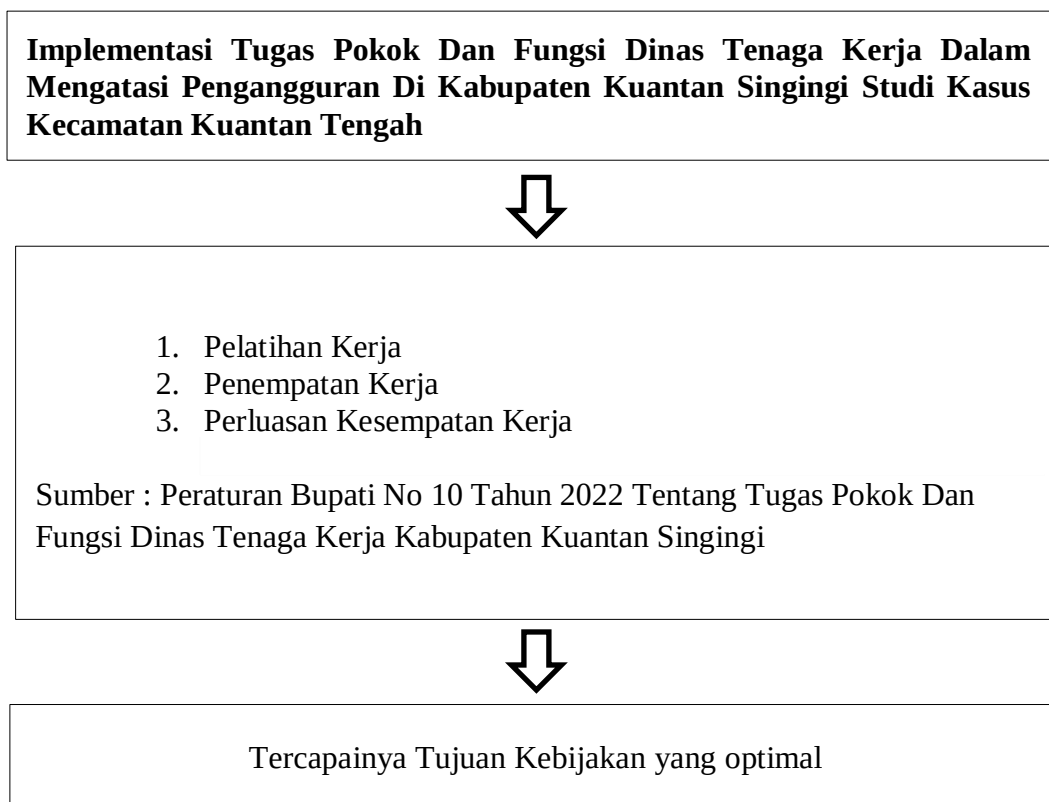
- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di bidang Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kualitas dan kemampuan birokrasi adalah tolak ukur berhasilnya penyelenggaraan suatu tata pemerintahan yang baik. Kemampuan suatu birokrasi pemerintahan dalam mengelola tugas dan wewenang serta kebijakan yang baik dan benar yang harus di miliki pemerintah.

Gambar II.1 : kerangka pemikiran Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah



Sumber : Modifikasi Penelitian 2024

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dan permasalahan yang telah di jelaskan peneliti serta kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan hipotesis bahwa di duga Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

2.4 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan analisis data dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ini, maka penulis membuat defenisi operasional Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi pasal 8 ayat 1 agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulisan diantaranya yaitu :

2.4.1 Pelatihan Kerja

Pelatihan Kerja adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan lebih efektif. Pelatihan ini bertujuan untuk menyiapkan individu atau karyawan agar dapat bekerja lebih baik, lebih efisien, dan lebih produktif sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pekerjaan

yang ada. Pelatihan kerja dapat dilakukan baik di tempat kerja (*on-the-job training*) maupun di luar tempat kerja (*off-the-job training*). Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasikan. Kesesuaian materi pelatihan harus sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

2.4.2 Penempatan Kerja

Penempatan Kerja adalah proses mengalokasikan individu atau karyawan ke posisi atau pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan minat mereka, serta kebutuhan organisasi. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia. Kesesuaian latar belakang pendidikan dengan posisi yang ditempati, kesesuaian pengetahuan tentang tugas dan aturan kerja serta keterampilan yang dimiliki.

2.4.3 Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi individu, baik di sektor formal maupun informal, dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Perluasan kesempatan kerja sangat dipengaruhi oleh interaksi antara investasi, tingkat upah, dan kebijakan pemerintah. Untuk mencapai tujuan perluasan kesempatan kerja secara efektif, diperlukan sinergi antara ketiga faktor ini. Peningkatan investasi dan upah harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung agar dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Kebijakan	Implementasi	1. Pelatihan Kerja	a. Keterampilan	Ordinal
			b. Pencapaian	
		2. Penempatan Kerja	a. Kesesuaian Posisi Dengan Keterampilan	Ordinal
			b. Fasilitas	
		3. Perluasan Kesempatan Kerja	a. Informasi	Ordinal
			b. Pengembangan Karir	
			a. Kerja Sama	

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian *mixed method* yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Menurut Fraenkel dan Wallen (dalam Maidiana, 2021:2) survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menayakannya melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi.

Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018:3) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Memang adakalanya dalam penelitian deskriptif ingin juga membuktikan dugaan, tetapi hal ini tidak terlalu lazim terjadi.

Sedangkan Menurut Harahap (2020:22) penelitian kualitatif umum dan pada dasarnya dipergunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora, dalam aturan kajian mikro. Terutama berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia (*behavior*) dan apa yang dibalik tingkah laku tersebut yang biasanya sulit untuk diukur dengan angka-angka. Karena apa yang kelihatan menggejala tidak selalu

sama dengan apa yang ada di dalam pikiran dan keinginan sebenarnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (fenomena) sosial.

3.2 Informan Populasi dan Sampel

3.2.1 Informan

Menurut Suriani dan Jailani (2023:33) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan insidental. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Untuk lebih jelasnya mengenai informan penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1 : Jumlah informen dan key informen dalam penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase
		Informan	Key informan	
1	Kepala Dinas	1	1	40%
2	Sekretaris	1	1	
3	Kabid Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1	1	30%
4	Masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja	33	1	30%
Jumlah		36	3	100%

Sumber : Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

3.2.2 Populasi

Menurut Agustianti et al (2022 : 3) populasi dapat didefinisikan sebagai seluruh anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu atau satu set karakteristik yang sama.

3.2.3 Sampel

Menurut, Ummul Aiman et al (2022 : 80) sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dipunyai oleh populasi tersebut.

Responden yang penulis pilih dalam penelitian ditentukan jumlahnya dengan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

E = Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (15% = 0,15)

Dari rumus slovin tersebut dalam penelitian ini untuk sampelnya adalah berjumlah :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{130}{1 + 130 \cdot (0,15)^2}$$

$$n = \frac{130}{1 + 130 \cdot 0,0225}$$

$$n = \frac{130}{1 + 2,925}$$

$$n = \frac{130}{3,925} = 33 \text{ (digenapkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 33 masyarakat . Jumlah responden tersebut dianggap sudah representatif untuk memperoleh data penulisan yang mencerminkan keadaan populasi.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Siregar (2022:4) data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung, dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Siregar (2022:4) data sekunder adalah data yang bersumber eksternal yang didapat melalui referensi dari luar, baik artikel, jurnal, dan lainnya.

3.4 Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemda Dinas Tenaga Kerja Dan imigrasi Kabupaten Kuantan Singingi Jl.H.Roesli Nomor.1, Teluk Kuantan, Kbaupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Telepon : (0764) 321102.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Makbul (2021:12)metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data.

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.6.1 Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017:9) kuesioner adalah alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab.

Kuesioner dapat berisi pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi dari keduanya. Metode pengumpulan data dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden.

3.6.2 Wawancara

Menurut Makbul (2021:13) wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.

3.6.3 Observasi

Menurut Makbul (2021:14) observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca inderamata sebagai alat bantu utamanya selain panca inderalainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Oleh karena itu observasi merupakan kemampuan manusia menggunakan seluruh panca inderanyadan memperoleh hasil dari fungsi panca inderautama yaitu mata untuk memperoleh data atau informasi.

3.6.4 Dokumentasi

Menurut Makbul (2021:24) teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis atau rekaman yang relevan dengan topik penelitian. Ini bisa termasuk dokumen resmi, laporan, foto, atau rekaman video

yang dapat memberikan konteks tambahan bagi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3.6.5 Triagulasi

Menurut Moleong (dalam Magdalena, 2021:6) triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan data biasa disebut sebagai pembanding data

3.7 Analisis Data

Menurut Octavian dan Sutriani (2019:1) analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Menyusun data berarti menggolongkannya menjadi sebuah tema, pola atau kategori sesuai dengan yang dimaksud. Dari susunan data tersebut kemudian akan didapat beberapa tafsiran atau interpretasi yang memiliki arti untuk memberikan makna kepada analisis, penjelasan pola atau kategori tadi dan mencari hubungan antara berbagai konsep.

3.7.1 Penskoran

Menurut Sugiyono (2013:93) penskoran Instrumen Skala *Likert*. Dalam operasional keseluruhan variabel ini diukur oleh instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner yang meliputi pernyataan Skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2013:93) skala likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekumpulan orang mengenai situasi yang terjadi lingkungan sosial. Untuk setiap pilihan jawaban diberi nilai, maka responden harus mendiskripsikan, menerima pernyataan (positif) atau menolak pernyataan (negatif).

Tabel 3. 1 Penskoran Skala *Likert* untuk Kuesioner

Jawaban Responden	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

(Sari & Amrozi, 2020)

Untuk menyajikan data agar hasilnya berupa angka dan disimpulkan dalam bentuk tabel frekuensi, Rumus persentase yang digunakan untuk menghitung data dalam penelitian ini adalah:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

f = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah frekuensi atau banyak individu

Data yang dipersentasekan kemudian direkapitulasikan dan diberi kriteria sebagai berikut:

- a. 81% -100% dikategorikan Sangat Efektif
- b. 61% - 80% dikategorikan Efektif
- c. 41% - 60% dikategorikan Cukup Efektif
- d. 21% - 40% dikategorikan Kurang Efektif
- e. 0% - 20% dikategorikan Tidak Efektif

(Sari & Amrozi, 2020)

Respon dari pegawai selanjutnya di analisis agar mendapati item indikator mana yang memperoleh skor tertinggi dan juga terendah.

Tabel 3. 2 Kategori Penskoran Skala Persentase

Persentase	Keterangan	Interpretasi
81 - 100 %	Sangat Setuju	Sangat Efektif
61- 80 %	Setuju	Efektif
41 – 60 %	Cukup Setuju	Cukup Efektif
21 – 40 %	Kurang Setuju	Kurang Efektif
0 – 20 %	Tidak Setuju	Tidak Efektif

(Sari & Amrozi, 2020)

Penelitian ini dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan memiliki langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Dalam tahap ini Identifikasi Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.
 - b. Identifikasi jenis data penelitian
2. Tahap Pengumpulan data memiliki langkah-langkah sebagai berikut
 - a. Pembuatan kuesioner penelitian Dan pedoman wawancara
 - b. memilih responden dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
3. Tahap Penyajian data memiliki langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Kuesioner dinyatakan valid oleh validator diinput melalui *google form*

- b. Pengisian kuesioner oleh masyarakat yang telah mengikuti program pelatihan kerja
 - c. Menghitung hasil kuesioner
 - d. Melakukan uji analisis data menggunakan IBM SPSS *Statistic*
4. Tahap Kesimpulan memiliki langkah-langkah sebagai berikut
- a. Mengolah dan menganalisis data
 - b. dan penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

3.7.2 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Octaviani dan Sutriani (2019:7) semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.7.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Octaviani dan Sutriani (2019:7) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ verification*)

Menurut Octaviani dan Sutriani (2019:7) kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah.

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal			x																					
3	Bimbingan Proposal							x	x	x	x	x	x												
4	Seminar Proposal													x											
5	Revisi Proposal																x								
6	Pembuatan Skripsi																	x	x	x					
7	Bimbingan Skripsi																			x	x	x	x		
8	Sidang Skripsi																							x	
9	Revisi Skripsi																								x

Sumber : Modifikasi Penelitian 2024

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah cukup terimplementasikan. Keberhasilan terlihat dari pelatihan kerja yang meningkatkan keterampilan peserta pencari kerja, memungkinkan mereka bersaing di pasar kerja dan membuka usaha mandiri.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan dari kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 6.2.1 Besar harapan agar Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan berbagai sektor lainnya. Dengan adanya kerjasama yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dapat memaksimalkan perannya dalam menurunkan angka pengangguran, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan calon tenaga kerja.
- 6.2.2 Diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memiliki balai latihan kerja. Pembangunan balai latihan kerja bertujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan siswa agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan adanya

balai latihan kerja, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan dalam dunia pekerjaan, balai latihan kerja menjadi jembatan bagi para lulusan SMA/SMK karena di sana akan diajarkan dasar-dasar bekerja di dunia industri dan usaha, seperti teknik mesin, kecantikan, menjahit, dan spa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arie Ambarwati, 2021. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Alexander Phuk, 2019. *Konsep Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Media Nusa Creative.
- Dicky Wisnu, 2019. *Teori Organisasi, Struktur dan Desain*. Malang: UMM Press.
- Harahap, 2020. *Penelitian kualitatif*. Medan Sumatera Utara: Wal ashri Publishing
- Hildawati, 2024. *sistem administrasi negara*. Yogyakarta: Green Pustaka
- Humairah Almahdali, 2024. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sumatra Barat: Lakeisha.
- Nugraha, B., Eka, P., Kadek, P., Dwi, W., Rudi, W., Imas, M., Indah, S., Maesarini, W., Taqwaty, R., Asri, F., Iwan, K., Kusnadi, H., & Hendrayady, 2022. *Teori Administrasi*. Padang Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Nur & Guntur, 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Sugiyono, 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfaberta.
- Syahrudin, 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa media.
- udin, 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar: Cv Sah Media.
- Widyanti, 2019. *Perilaku organisasi teori dan konsep*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Mab Banjarmasin.

B. Jurnal

- Aneta, A. 2012. Perkembangan teori administrasi negara. Dalam Jurnal Inovasi. Vol 09. No.01 2012. (1693-9034). ISSN.
- Cristianingsih, 2020. Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi. Vol. 12 No. 2 2018.

- Indah, & Hariyanti, 2018. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominfo kota tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 12 No. 2 2018. (2548-7647). ISSN
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, 2021. Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*. Vol. 3 No. 1 2021. (119-128). Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Maidiana, 2021. Penelitian survey. *ALACRITY: Journal of Education*. Vol. 2 No. 1 2021 (20-29). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rahmawati, 2018. Peranan administrasi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sudut pandang islam. *Jurnal pemerintahan dan politik*. Vol. 3 No. 2 2018. (2502-2032). ISSN
- Rawati gulo, & mendrofa, 024. Implementasi kebijakan publik serta terhadap kepentingan publik berdasarkan teori administrasi negara saat ini. *Jurnal genta mulia*. Vol. 15 no. 1 2024. (387-392). ISSN
- Siregar, Darwis, Baroroh, 2022. Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang. *Jurnal Ilmiah Kampus*. Vol. 2 No. 1 2022. (255-287). ISSN.
- Suriani, & Jailani, 2023. Konsep populasi dan sampling serta pemilihan partisipan ditinjau dari penelitian ilmiah pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1 No. 2 2023. (2987-1298). ISSN.
- Udin, & Gazalin, 2023. Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Penanggulangan Pengangguran Terbuka Di Kota Baubau. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 4 No. 1 2023 (2722-9467). ISSN.
- Zellatifanny, & Mudjiyanto, 2018. Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*. Vol. 1 No. 2 2018. (83-90).

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang bahwa Indonesia adalah negara hukum.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerjaka bupaten Kuantan Singingi Pasal 8 Ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan perubahan yakni Undang undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Internet

<https://jurnal.ipi.web.id/jurnalipi/article/view/163/105> Diakses pada 25 november 2024.

<https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/2590/2057> Diakses pada 25 november 2024.

<https://jdih.kuansing.go.id/search.html> Diakses pada 20 november 2024.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Pejabat Fungsional Bagian Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja



Wawancara bersama Kabid Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja



Wawancara bersama Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi

DOKUMENTASI KUISIONER



Dokumentasi Bersama masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja



Dokumentasi Bersama masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja



Dokumentasi Bersama masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja

DAFTAR KUSIONER PENELITIAN

Judul : Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah

Kepada : Masyarakat peserta pelatihan Di Kecamatan Kuantan Tengah

A. Identitas Peneliti

Nama : Rafika Ahlussunnah
 NPM : 210411006
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Masa Kerja :
 Alamat :

C. Petunjuk

- a. Daftar kusioner ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
- b. Hasil kusioner dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari bagi pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- c. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
- d. Atas Kerjasama Bapak/Ibuk/Saudara/i saya mengucapkan terimakasih.

D. Daftar Kusioner Penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah

A. Pelatihan Kerja : adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan lebih efektif.

1. Menurut Bapak/Ibuk/Saudara/i apakah pelatihan yang di berikan oleh pemerintah efektif untuk meningkatkan keterampilan peserta pencari kerja?
 - a. Sangat Efektif
 - b. Efektif
 - c. Cukup Efektif
 - d. Kurang Efektif
 - e. Tidak Efektif
2. Menurut Bapak/Ibuk/Saudara/i apakah pelatihan kerja yang di berikan pemerintah berhasil mengurangi pengangguran di kabupaten kuantan singingi?
 - a. Sangat Berhasil
 - b. Berhasil
 - c. Cukup Berhasil
 - d. Kurang Berhasil
 - e. Tidak Berhasil

B. Penempatan Kerja : Penempatan Kerja adalah proses mengalokasikan individu atau karyawan ke posisi atau pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan minat mereka, serta kebutuhan organisasi.

1. Menurut Bapak/Ibuk/Saudara/i apakah pelatihan kerja yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja telah sesuai dengan penempatan kerja dan posisi kerja yang diharapkan ?
 - a. Sangat Sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup Sesuai
 - d. Kurang Sesuai
 - e. Tidak Sesuai

2. Menurut Bapak/Ibuk/Saudara/i apakah fasilitas yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah mendukung keberhasilan pelatihan kerja?
 - a. Sangat Mendukung
 - b. Mendukung
 - c. Cukup Mendukung
 - d. Kurang Mendukung
 - e. Tidak Mendukung

C. Perluasan Kesempatan Kerja : Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi individu, baik di sektor formal maupun informal, dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Menurut Bapak/Ibuk/Saudara/i apakah masyarakat kabupaten kuantan singingi memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah ?
 - a. Sangat cukup memiliki akses
 - b. Memiliki akses
 - c. Cukup memiliki akses
 - d. Kurang memiliki akses
 - e. Tidak memiliki akses

2. Menurut Bapak/Ibuk/Saudara/i apakah program pengembangan karir ini berjalan dengan baik dan dapat memperluas kesempatan kerja terhadap masyarakat dikabupaten kuantan singingi?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik

3. Menurut Bapak/Ibuk/Saudara/i apakah Dinas Tenaga Kerja telah ada melakukan kerja sama antara perusahaan dan sektor lainnya dalam menciptakan kesempatan kerja?
 - a. Sangat ada
 - b. Ada
 - c. Cukup Ada
 - d. Kurang Ada
 - e. Tidak Ada

Teluk Kuantan, februari 2025

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Judul : Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah

Kepada : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kabid Pelatihan, Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kabid Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja.

A. Identitas Peneliti

Nama : Rafika Ahlussunnah
 NPM : 210411006
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1(Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Jabatan :
 Masa Kerja :
 Alamat :

C. Petunjuk

- a. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun dan dimaksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
- b. Hasil wawancara dalam penelitian di harapkan dapat bermanfaat dari bagi pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
- c. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiaannya.
- d. Atas Kerjasama Bapak/Ibuk/Saudara/i saya mengucapkan terimakasih.

D. Daftar Wawancara Penelitian tentang Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Kuantan Singingi Studi Kasus Kecamatan Kuantan Tengah

A. Pelatihan Kerja : adalah suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan lebih efektif.

1. Apakah pelatihan yang Bapak/ibu/i berikan kepada masyarakat sudah efektif untuk meningkatkan keterampilan peserta pencari kerja?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Apakah pelatihan kerja yang Bapak/Ibu/i berikan kepada masyarakat telah mencapai tujuan yang di harapkan?

.....

.....

.....

.....

.....

B. Penempatan Kerja : Penempatan Kerja adalah proses mengalokasikan individu atau karyawan ke posisi atau pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan minat mereka, serta kebutuhan organisasi.

1. Apakah penempatan kerja selama ini telah sesuai dengan posisi kerja dan keterampilan kerja bagi masyarakat penerima program pelatihan kerja oleh dinas tenaga kerja?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimanakah upaya Dinas Tenaga Kerja dalam menyediakan fasilitas yang di gunakan untuk masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja?

.....

.....

.....

.....

.....

- C. Perluasan Kesempatan Kerja :** Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi individu, baik di sektor formal maupun informal, dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 1 Apakah program pelatihan yang di berikan Dinas Tenaga Kerja memiliki akses yang cukup oleh masyarakat kabupatenkuantan singingi mengenai informasi kesempatan kerja yang diberikan?

.....

.....

.....

.....

.....

- 2 Apakah program pelatihan kerja yang di sediakan Dinas Tenaga Kerja dapat mengembangkan karir dan memperluas kesempatan kerja terhadap masyarakat kabupaten kuantan singingi?

.....
.....
.....
.....
.....

- 3 Apakah ada upaya Dinas Tenaga Kerja untuk bekerja sama antar perusahaan atau sektor lain dalam menciptakan kesempatan kerja di kabupaten kuantan singingi?

.....
.....
.....
.....
.....

Teluk Kuantan, februari 2025



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Rafika Ahlussunnah

NPM : 210411006

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Peratguran Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sastra Tata Kerja
Disnaker Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis/09 Januari 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Rafika Ahlussunnah
NPM : 210411006
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi. (Studi Kasus di Kecamatan Kuantan Tengah).

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 15 Mei 2025

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Anggota 2	4.
5.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini difotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing I (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

FORM 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Rafika Ahlussunnah

NPM : 210411006

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Peratguran Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sastra Tata Kerja
Disnaker Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis/09 Januari 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

NO	Hari/Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Kamis 5/12/2024	Buatkan Masalah di latar Belakang	Eanf	
2.	Jum'at 6/12/2024	Ganti Kerangka Pemikiran dg Teori	Eanf	
3.	Selasa 9/12/2024	Tanda Tangan Pengesahan	Eanf	
4	Rabu 10/12/2024	Acc	Eanf	



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RAFIKA AHLUSSUNNAH
NPM : 210411006
DOSEN PEMBIMBING : PEMBIMBING I : EMILIA EMHARIS, S. Sos, M.Si
PEMBIMBING II : ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
JUDUL : IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
TENAGA KERJA DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN DIKABUPATEN KUANTAN
SINGINGI STUDI KASUS DI KECAMATAN KUANTAN
TENGAH

NO	Hari/Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Senin 16/02/2025	Bimbingan Daftar Wawancara & Kuesioner		
2	Senin 24/02/2025	Merapikan Penulisan bab 4 & 5		
3	Kamis 13/03/2025	Bimbingan Isi dan bab 4-5		
4	Jum'at 14/03/2025	Bimbingan Data Tabel		
5	Senin 16/03/2025	Bimbingan Kesimpulan dan Saran		

NO	Hari/Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
6	17/2025 /3	Acc		Ans
1.	Selasa 18/03/2025	Menambahkan rumus dibawah Tabel	Eanf	
2.	Rabu 19/03/2025	Merapikan Penulisan	Eanf	
3	25/2025 /3	Acc	Eanf	



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Tugu Timur, Ps. Taluk Kec. Kuantan Tengah Kode Pos 29562

TALUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 560/ Disnaker-Sekr/2025/56

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : Rafika Ahlussunnah
NPM : 210411006
UNIVERSITAS : Islam Kuantan Singingi
PROGRAM STUDI : Administrasi Negara
JUDUL PENELITIAN : "Implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Kuantan Singingi studi kasus di Kecamatan Kuantan Tengah"

Bahwa nama yang diatas, benar telah melakukan Penelitian di OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan singingi selama Bulan terhitung pada tanggal 18 Februari 2025.

Demikian Surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi


Drs. Masnur, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19671221 199303 1 003



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

NOMOR: 059/Kpts/FIS/UNIKS/X/2024

**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- imbang :**
1. bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- ingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- etapkan :**
1. Menunjuk :
a. Nama : Sahri Muharam, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I
b. Nama : Alsar Andri, S.Sos.,M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Neni Ramadhan Aulia

NPM : 210411005

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



**DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 09 OKTOBER 2024**

y Dekan,

**RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN-1030058402**

Ketua Program Studi Administrasi Negara

Mahasiswa

Artis

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rafika Ahlussunnah
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Kunik, 05 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Sako



Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 016 Sako Pangean
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kuantan Singingi
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Teluk Kuantan

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Teluk Kuantan, 17 Maret 2025

Rafika Ahlussunnah
NPM. 2111006